



# POLICY ANALYSIS

## *IMPLIKASI PEMULANGAN HAMBALI TERHADAP STABILITAS NASIONAL DAN KEBIJAKAN KEAMANAN INDONESIA*

POLICY ANALYSIS INI DISUSUN DARI HASIL VIRTUAL FGD  
THINKTANKTALK EPS. 2 PADA 16 MARET 2025

**ThinkTank.id**

[WWW.THINKTANKINDONESIA.COM](http://WWW.THINKTANKINDONESIA.COM)

Jl. TB Simatupang, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia



# KATA PENGANTAR



**M. ROZI IRMAN ZIADI, M.ED**  
- Executive Director Thinktank.ID

## TIM PENYUSUN

**FATHORRAHMAN HASBUL, S.I.KOM, MA**  
- Research Director Thinktank.ID

**SISKA AZHARI, S.S., M.HAN**  
- Co Founder Thinktank.ID

**HAMZAH ZAELANI, M.HAN**  
- Director of Strategic Alliances Thinktank.ID

Sebagai Direktur Eksekutif ThinkTank.ID, saya menegaskan bahwa dinamika pemulangan individu yang terafiliasi dengan jaringan terorisme transnasional, seperti Encep Nurjaman alias Hambali, bukan sekadar isu hukum atau diplomasi, tetapi merupakan tantangan multidimensional yang menyentuh aspek keamanan nasional, stabilitas sosial-politik, serta posisi Indonesia dalam tatanan global pasca Global War on Terror (GWOT). Dalam konteks ini, pendekatan strategis yang komprehensif, berbasis data dan kolaboratif lintas sektor, menjadi kebutuhan mutlak. ThinkTank.ID sebagai lembaga kajian strategis independen yang fokus pada isu radikalisme, kontra-terorisme, dan diplomasi, berkomitmen untuk menghadirkan analisis berbasis bukti (evidence-based policy), guna mendukung proses pengambilan keputusan yang cermat, adil, dan berkeadilan.

Policy Analysis ini disusun sebagai bentuk kontribusi kritis terhadap wacana publik yang berkembang, dan merupakan hasil pemikiran kolektif dalam Forum Group Discussion (FGD) yang kami selenggarakan secara terbuka melalui YouTube Live Streaming pada 16 Maret 2025, dengan mengangkat tema "Menakar Implikasi Pemulangan Hambali terhadap Stabilitas Nasional". Kegiatan ini melibatkan narasumber dari berbagai latar belakang, termasuk Pak Tony sebagai penyintas langsung aksi terorisme dan Dr. Al Haidar yang memberikan perspektif akademik serta yuridis terhadap tantangan deradikalisasi dan penegakan hukum. Diskusi tersebut memperkaya sudut pandang kami dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya mengedepankan aspek keamanan, tetapi juga menjamin hak korban, serta mempertimbangkan kepentingan jangka panjang Indonesia dalam menjaga kohesi sosial dan reputasi internasional.

Kami berharap, Policy Analysis ini dapat menjadi rujukan bagi para pemangku kebijakan, akademisi, dan masyarakat sipil dalam memahami kompleksitas kasus Hambali secara proporsional, serta dalam merancang strategi respons yang berimbang—antara ketegasan negara dalam menjaga kedaulatan hukum dan keamanan, dengan pendekatan manusiawi yang menghormati hak asasi dan nilai keadilan. Semoga publikasi ini menjadi kontribusi bermakna dalam memperkuat sistem ketahanan nasional dari infiltrasi paham radikal, serta mendorong tata kelola kebijakan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan strategis bangsa.

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Wacana pemulangan Encep Nurjaman (Hambali) dari Guantanamo Bay ke Indonesia menimbulkan implikasi signifikan terhadap keamanan nasional, diplomasi, dan kebijakan deradikalisasi yang memerlukan respons strategis dan terintegrasi. Berdasarkan dialog publik yang diselenggarakan ThinkTank.ID pada Maret 2025, *policy analysis* ini mengidentifikasi empat perspektif utama—BNPT, akademisi, diplomat, dan penyintas terorisme—yang menggarisbawahi kompleksitas isu ini dari segi hukum, keamanan, hubungan internasional, dan dampak terhadap korban.

Rekomendasi kebijakan yang diusulkan mencakup penyusunan protokol pemulangan eks-tahanan terorisme, revisi UU No. 5 Tahun 2018, penerapan program deradikalisasi berbasis evaluasi psikososial, perlindungan komprehensif bagi penyintas, diplomasi strategis dalam menangani tekanan internasional, penguatan edukasi kontra-radikalisme, pembentukan kerangka kerja nasional penanganan eks-teroris, serta memastikan kehadiran negara yang aktif dan responsif, guna mencapai keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia, keadilan bagi korban, dan ketahanan nasional.



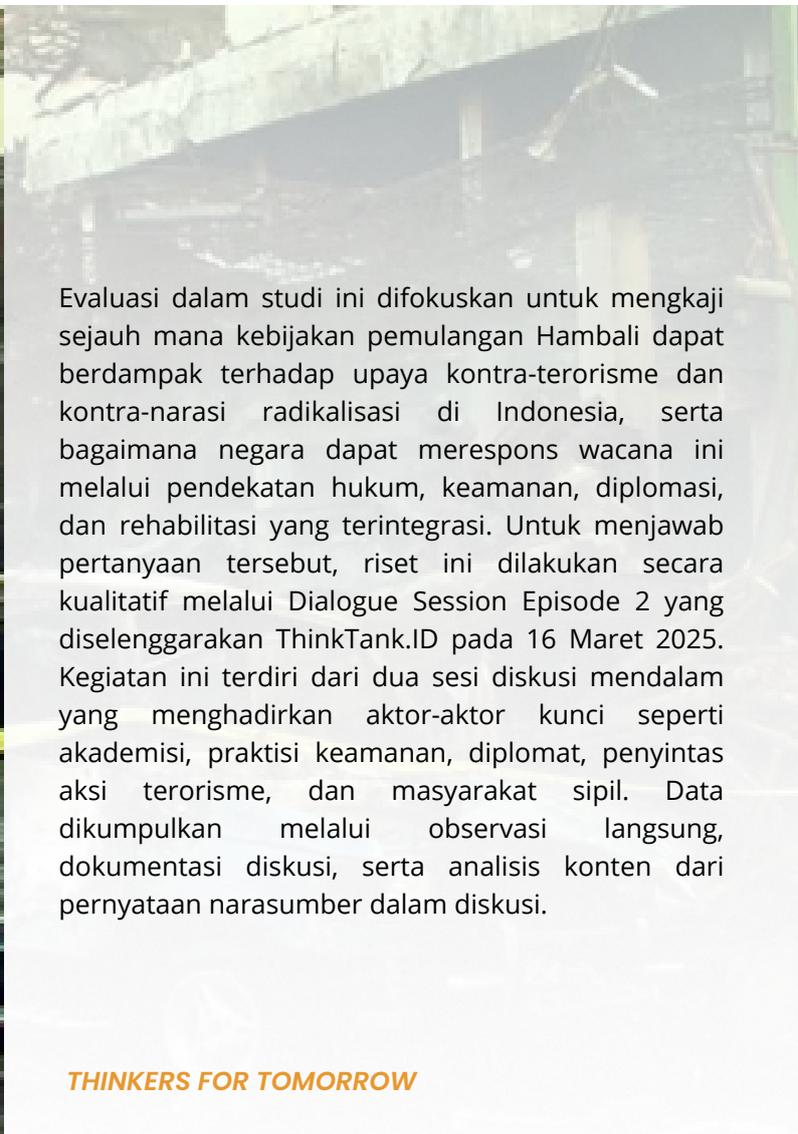
## PENGANTAR

*Policy analysis* ini menyajikan analisis komprehensif mengenai wacana pemulangan Encep Nurjaman (Hambali) ke Indonesia dan implikasinya terhadap keamanan nasional, kebijakan deradikalisasi, dan hubungan internasional. Berdasarkan temuan dialog publik yang diselenggarakan oleh ThinkTank.ID pada Maret 2025, dokumen ini mengintegrasikan perspektif dari berbagai pemangku kepentingan—termasuk BNPT, akademisi, diplomat, dan penyintas terorisme—untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berimbang antara perlindungan hak asasi manusia dan ketahanan nasional.

Pemulangan Hambali setelah lebih dari dua dekade penahanan di Guantanamo Bay tidak hanya menimbulkan tantangan bagi arsitektur keamanan Indonesia, tetapi juga membuka peluang untuk memperkuat sistem penanganan ekstremisme dengan pendekatan yang lebih holistik, transparan, dan berpihak pada keadilan bagi para penyintas, sehingga diharapkan *policy brief* ini dapat menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan strategis pemerintah dalam menghadapi dilema keamanan kontemporer.

# METODOLOGI

Pelaksanaan riset ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya urgensi diskursus publik dan kebijakan terkait wacana pemulangan Encep Nurjaman alias Hambali, seorang tokoh sentral dalam jaringan terorisme global, yang berpotensi menimbulkan implikasi strategis terhadap keamanan nasional, stabilitas sosial, serta arah kebijakan deradikalisasi di Indonesia. Ketiadaan kepastian hukum selama lebih dari dua dekade penahanan Hambali di Guantanamo, serta pernyataan resmi pemerintah mengenai perlindungan hak hukum WNI di luar negeri, memicu polemik antara kepentingan hak asasi manusia dan kebutuhan akan ketahanan nasional.



Evaluasi dalam studi ini difokuskan untuk mengkaji sejauh mana kebijakan pemulangan Hambali dapat berdampak terhadap upaya kontra-terorisme dan kontra-narasi radikalisisasi di Indonesia, serta bagaimana negara dapat merespons wacana ini melalui pendekatan hukum, keamanan, diplomasi, dan rehabilitasi yang terintegrasi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, riset ini dilakukan secara kualitatif melalui Dialogue Session Episode 2 yang diselenggarakan ThinkTank.ID pada 16 Maret 2025. Kegiatan ini terdiri dari dua sesi diskusi mendalam yang menghadirkan aktor-aktor kunci seperti akademisi, praktisi keamanan, diplomat, penyintas aksi terorisme, dan masyarakat sipil. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, dokumentasi diskusi, serta analisis konten dari pernyataan narasumber dalam diskusi.

# TEMUAN PENELITIAN

Wacana pemulangan Hambali, seorang tersangka teroris yang kini masih ditahan di Guantanamo Bay, menimbulkan perdebatan di berbagai kalangan. Dalam diskusi ThinkTank.ID, terdapat empat perspektif utama yang dikemukakan terkait implikasi pemulangan Hambali, yaitu perspektif dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), akademisi, diplomat, dan penyintas. Masing-masing perspektif memberikan wawasan berbeda terkait bagaimana pemulangan Hambali dapat mempengaruhi stabilitas nasional, hukum, hubungan internasional, serta dampaknya bagi para korban terorisme.

## ***BNPT RI***

Dari sisi BNPT RI, pemulangan Hambali dianggap sebagai tantangan besar bagi kebijakan deradikalisasi Indonesia. BNPT menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap tingkat radikalisasi Hambali dan kebutuhan untuk menyesuaikan strategi rehabilitasi agar dapat mencegah potensi ancaman terhadap keamanan nasional. BNPT juga menyoroti pentingnya kerja sama dengan lembaga lain seperti Densus 88 dalam memastikan bahwa proses rehabilitasi dan reintegrasi berjalan efektif.

## ***DIPLOMASI***

Dari sisi diplomasi, pemulangan Hambali berpotensi menimbulkan tekanan terhadap citra Indonesia di kancah global. Seorang diplomat senior Dian Wirengjurit, M.A dalam diskusi menjelaskan bahwa keputusan ini dapat mempengaruhi persepsi negara-negara mitra terhadap komitmen Indonesia dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM. Isu ini menjadi semakin rumit mengingat sensitivitas terhadap terorisme sebagai tantangan lintas batas. Dalam diplomasi modern, langkah seperti ini bisa menimbulkan implikasi jangka panjang, tidak hanya terhadap hubungan bilateral, tetapi juga terhadap stabilitas domestik dan persepsi global terhadap sistem hukum Indonesia.

## ***AKADEMISI***

Dari perspektif akademisi dalam diskusi ini yang berfokus pada aspek teori dan praktis mengenai ekstremisme dan bagaimana Indonesia dapat memitigasi dampak radikalisasi lebih lanjut. Akademisi dalam hal ini direpresentasikan oleh Al Chaidar menggarisbawahi pentingnya pendekatan berbasis penelitian dalam merancang kebijakan penanggulangan terorisme yang tidak hanya mengutamakan aspek hukum, tetapi juga menyentuh akar penyebab radikalisasi. Dalam hal ini, pemulangan Hambali harus dilihat sebagai kesempatan untuk memperbaiki sistem pencegahan radikalisasi dan membangun ketahanan sosial.

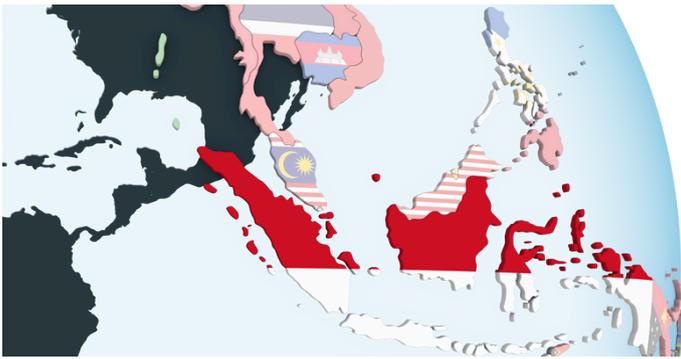
## ***PENYINTAS***

Sementara itu, dari sudut pandang penyintas seperti Pak Tony Soemarno, pemulangan Hambali bukan sekadar isu kebijakan, melainkan luka yang kembali dibuka. Para penyintas terorisme menilai wacana ini sebagai bentuk pengabaian terhadap penderitaan korban dan kegagalan negara dalam menegakkan keadilan. Mereka menekankan pentingnya kebijakan yang memprioritaskan kepentingan korban, termasuk kompensasi, dukungan psikologis, dan pengakuan negara atas trauma yang dialami. Oleh karena itu, temuan dari diskusi ini menyarankan agar pemerintah lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan strategis, dan lebih mengutamakan suara penyintas dan keadilan sosial dibanding sekadar kepentingan politik atau diplomatik sesaat.



# UPAYA DERADIKALISASI YANG DAPAT DILAKUKAN

Diskusi menggarisbawahi pentingnya pendekatan deradikalisasi berbasis penilaian risiko individual dan evaluasi psikososial. Narasumber dari kalangan akademisi dan praktisi kontra-terorisme menyarankan agar Hambali, apabila dipulangkan, harus menjalani pemantauan intensif di fasilitas tertutup dengan pengawasan Densus 88 dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Model deradikalisasi yang dianggap relevan adalah yang menekankan pada reintegrasi sosial, namun dilakukan secara bertahap dan selektif. Program seperti Saudi Arabia's PRAC (Prevention, Rehabilitation, and Aftercare) dan pendekatan Malaysia yang berbasis psikologis dan keagamaan disebut sebagai rujukan yang efektif untuk menghindari kegagalan reintegrasi dan residivisme terorisme.



Selain itu, narasi dari pihak diplomat dalam forum ini menyoroti bahwa upaya deradikalisasi harus memperhatikan posisi Indonesia di dunia internasional, terutama dalam konteks hak asasi manusia dan keamanan global. Deradikalisasi tidak boleh menjadi celah yang memungkinkan pelaku untuk lolos dari pertanggungjawaban hukum, tetapi harus dirancang sebagai proses transformasi yang terukur dan berbasis evaluasi risiko. Pandangan yang disampaikan oleh Pak Tony sebagai korban serangan teror JW Marriott menekankan bahwa deradikalisasi harus dimulai dari pengakuan dan perhatian negara terhadap penderitaan korban. Pemerintah perlu membangun sistem pendampingan psikologis dan sosial yang kuat bagi para penyintas, agar tidak merasa diabaikan dalam kebijakan yang lebih menitikberatkan pada pelaku.

Dalam diskusi ini juga muncul keprihatinan mengenai kemungkinan terjadinya "simpatik balik" dari masyarakat terhadap pelaku, apabila narasi yang dikedepankan hanya soal hak asasi pelaku tanpa adanya keseimbangan atas penderitaan korban. Oleh karena itu, edukasi publik menjadi salah satu elemen penting dalam upaya deradikalisasi, untuk memastikan masyarakat memahami bahaya ekstremisme dan pentingnya perlindungan terhadap penyintas. Pendidikan nilai dan moral yang inklusif menjadi salah satu fondasi utama dalam strategi deradikalisasi jangka panjang.



Hal ini ditegaskan oleh para pembicara sebagai cara paling efektif untuk mencegah regenerasi ideologi radikal di kalangan anak muda. Implementasi kurikulum pendidikan yang menanamkan nilai empati, toleransi, dan pemahaman lintas budaya perlu diperkuat. Pendidikan juga perlu dikaitkan dengan kesejahteraan ekonomi dan keadilan sosial, mengingat bahwa ketimpangan sosial sering menjadi lahan subur berkembangnya radikalisme. Oleh karena itu, strategi deradikalisasi juga harus bersifat lintas sektoral, melibatkan pendidikan, sosial, ekonomi, dan keamanan, serta menggandeng komunitas lokal sebagai garda depan dalam membendung ideologi ekstrem. Selain itu, model deradikalisasi yang relevan adalah yang mengedepankan reintegrasi sosial secara bertahap, dengan evaluasi risiko yang mendalam dan keterlibatan aktif dari masyarakat. Pendekatan ini harus memanfaatkan pengalaman dari negara-negara seperti Saudi Arabia dan Malaysia, serta melibatkan kerjasama intensif antara BNPT, Densus 88, dan lembaga terkait lainnya. Strategi ini juga mencakup pendidikan tentang narasi kontra-radikalisasi dan pengurangan potensi re-radikalisasi melalui program rehabilitasi berbasis komunitas yang efektif.

# DIPLOMASI INDONESIA TERKAIT WACANA PEMULANGAN HAMBALI

Dari aspek hubungan internasional, wacana pemulangan Hambali menempatkan Indonesia dalam posisi diplomatik yang kompleks. Amerika Serikat, melalui kebijakan penutupan Guantanamo oleh pemerintahan sebelumnya yaitu Joe Biden, mendorong repatriasi tahanan dengan pertimbangan hak asasi manusia dan beban diplomatik yang melekat. Indonesia, sebagai negara yang menjunjung prinsip kedaulatan dan perlindungan WNI, dihadapkan pada dilema antara tekanan internasional dan ancaman keamanan domestik. Para narasumber menekankan pentingnya diplomasi strategis yang mengedepankan transparansi, komitmen terhadap kerja sama kontra-terorisme, serta penyampaian rencana mitigasi risiko yang jelas kepada mitra internasional. Dengan cara ini, Indonesia dapat menunjukkan kesiapan politik dan teknis dalam mengelola pemulangan Hambali tanpa mencederai kepercayaan internasional terhadap stabilitas kawasan Asia Tenggara.

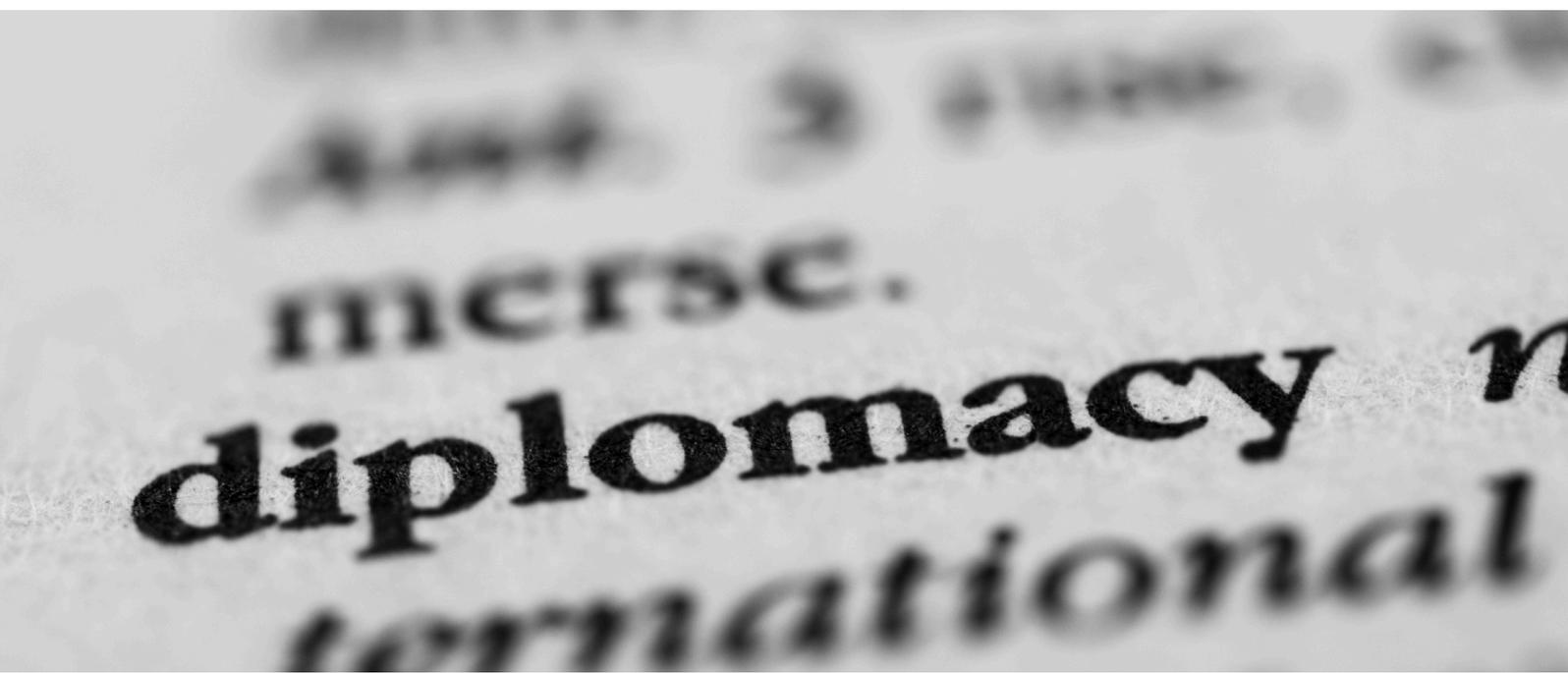
Diskusi publik yang diselenggarakan oleh ThinkTank.ID memberikan sorotan penting untuk melihat bagaimana Indonesia harus merespons isu ini secara hati-hati agar tidak menimbulkan gejolak politik dan sosial di dalam negeri, sekaligus menjaga citra internasionalnya. Diplomat yang hadir menyampaikan bahwa isu pemulangan ini merupakan ujian bagi Indonesia dalam mempertahankan prinsip-prinsip hak asasi manusia sambil tetap menunjukkan ketegasan dalam menanggapi ancaman terhadap keamanan nasional.



# DIPLOMASI INDONESIA TERKAIT WACANA PEMULANGAN HAMBALI

Dari sudut pandang diplomasi, pemulangan Hambali bukanlah sekadar persoalan administratif antarnegara, tetapi menyangkut reputasi Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Dalam diskusi terungkap bahwa keputusan diplomatik yang akan diambil terkait pemulangan ini harus mempertimbangkan dampaknya terhadap hubungan luar negeri, khususnya dengan Amerika Serikat dan negara-negara tetangga yang pernah terdampak aksi terorisme yang melibatkan Hambali. Selain itu, pemulangan ini bisa menjadi preseden buruk jika tidak disertai dengan pengawasan hukum dan keamanan yang ketat. Oleh sebab itu, diperlukan kajian komprehensif antar lembaga negara sebelum keputusan apapun diambil, termasuk keterlibatan Kementerian Luar Negeri, BNPT, dan aparat penegak hukum.

Isu ini juga menyentuh aspek sensitif dalam hubungan diplomasi publik, yaitu bagaimana negara menjawab ekspektasi masyarakat internasional dan domestik terhadap perlakuan terhadap pelaku terorisme. Dalam konteks ini, transparansi dan komunikasi strategis menjadi elemen penting diplomasi. Pemerintah Indonesia diharapkan mampu menjelaskan secara terbuka kepada publik internasional dan nasional tentang alasan di balik kebijakan yang diambil, serta memastikan bahwa proses yang dilalui tidak mengabaikan hak-hak korban dan keluarga penyintas. Kesaksian dari Pak Tony, seorang penyintas tragedi bom JW Marriott, menjadi bukti nyata bahwa diplomasi tidak hanya berbicara di ruang elit kenegaraan, tetapi juga harus mengakomodasi suara-suara yang selama ini jarang terdengar dalam perumusan kebijakan luar negeri.



merse.  
**diplomacy**  
international

Dengan demikian, diskusi ini menggarisbawahi bahwa diplomasi Indonesia di era kontemporer harus mampu bersikap tegas namun berimbang—mengutamakan kepentingan nasional tanpa mengesampingkan nilai-nilai universal. Dalam kasus pemulangan Hambali, keputusan Indonesia akan menjadi cerminan dari komitmen negara terhadap keadilan, perlindungan korban, dan kerja sama internasional dalam memerangi terorisme. Kebijakan luar negeri tidak lagi semata-mata urusan antarnegara, tetapi juga menyentuh ranah hak asasi manusia, keamanan publik, dan legitimasi moral di mata dunia. Oleh karena itu, langkah diplomatik yang diambil perlu mempertimbangkan sensitivitas isu ini secara mendalam agar tidak justru membuka ruang baru bagi ketidakstabilan sosial dan kecaman global.

# KEHADIRAN NEGARA UNTUK MENJAGA STABILITAS KEAMANAN NASIONAL



Kehadiran negara dalam menjaga stabilitas keamanan nasional menjadi elemen krusial dalam merespons isu-isu strategis seperti pemulangan Hambali ini. Negara tidak hanya harus hadir dalam fase penindakan terhadap potensi ancaman, tetapi juga dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat dan penyintas terorisme.

Pemulangan terduga teroris seperti Hambali dapat menimbulkan kekhawatiran baru jika tidak dibarengi dengan sistem pengawasan yang kuat dan pendekatan yang berbasis pada transparansi hukum. Dalam hal ini, negara perlu memperkuat koordinasi lintas sektor dan memperhatikan kebutuhan korban dengan menyediakan sistem pendampingan jangka panjang, termasuk layanan kesehatan mental dan kompensasi yang layak.

Selain itu, pendekatan preventif, melalui edukasi dan penguatan kontra-narasi terhadap ideologi radikal, menjadi penting untuk menciptakan ketahanan masyarakat yang lebih kuat. Oleh karena itu, pemulangan Hambali harus dilihat sebagai kesempatan untuk memperkuat arsitektur keamanan nasional yang terintegrasi dan berbasis kolaborasi antara negara, masyarakat sipil, serta komunitas internasional, guna memastikan stabilitas dan keamanan nasional yang berkelanjutan.

Temuan akhir dalam penelitian ini menunjukkan bahwa negara harus hadir secara aktif dan terkoordinasi untuk menghindari kegagalan kebijakan dalam merespons pemulangan individu dengan potensi ancaman tinggi untuk stabilitas keamanan negara.



# REKOMENDASI KEBIJAKAN

Terdapat empat perspektif utama yang dikemukakan terkait implikasi pemulangan Hambali, yaitu **perspektif dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), akademisi, diplomat, dan penyintas**. Forum ThinkTank.ID merekomendasikan pentingnya penyusunan mekanisme hukum yang lebih spesifik terkait pemulangan eks-tahanan ekstremis internasional, termasuk kemungkinan revisi UU No. 5 Tahun 2018. Kehadiran negara juga tidak hanya diukur dari kekuatan represif aparat, tetapi juga dalam upaya membangun ketahanan masyarakat melalui edukasi, literasi keamanan, dan penguatan kontra-narasi ekstremisme. Dalam konteks ini, pemulangan Hambali harus menjadi momentum untuk memperkuat arsitektur keamanan nasional yang responsif, inklusif, dan berbasis kolaborasi antara negara, masyarakat sipil, serta komunitas internasional. Berikut sejumlah rekomendasi yang ditawarkan untuk wacana ini:

**1 Pemetaan Diplomatik dan Hukum:** Pemerintah Indonesia perlu menyiapkan peta jalan diplomatik dan hukum sebagai bentuk antisipasi jika skenario pemulangan Hambali benar-benar terjadi, dengan mempertimbangkan ancaman hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan kepada Hambali berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 13A UU No. 5 Tahun 2018, termasuk pidana seumur hidup atau hukuman mati.

**2 Pendekatan Deradikalisasi yang Khusus:** Diperlukan pendekatan deradikalisasi yang disesuaikan dengan melibatkan BNPT, Densus 88, tokoh agama moderat, dan lembaga pemasyarakatan, yang mencakup empat tahapan: identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi, dengan menggunakan model keberhasilan program terhadap mantan napiter seperti Umar Patek sebagai acuan.

**3 Pengawasan Hukum dan Pembatasan Mobilitas:** Pemerintah perlu menerapkan sistem pengawasan berbasis hukum yang menjamin Hambali tidak terlibat dalam aktivitas ekstrem, dengan memanfaatkan Pasal 12B UU No. 5 Tahun 2018 untuk pencabutan hak kepemilikan paspor, pembatasan mobilitas, serta pemantauan secara periodik oleh aparat penegak hukum.

**4 Transparansi dalam Komunikasi Publik:** Pemerintah Indonesia harus memastikan narasi yang faktual, transparan, dan bertanggung jawab disampaikan kepada publik mengenai wacana pemulangan Hambali, guna meredam spekulasi dan mencegah penyebaran hoaks, mengingat pernyataan terbaru Prof. Yusril Ihza Mahendra yang menegaskan bahwa pemulangan Hambali masih "terlalu jauh" dan akan diadili di Pengadilan Militer Amerika Serikat.

**5 Pemulihan Korban Terorisme:** Negara perlu memberikan dukungan psikososial dan kompensasi yang memadai kepada penyintas terorisme, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU No. 5 Tahun 2018, serta memastikan bahwa proses hukum terhadap pelaku ekstremisme tidak mengabaikan penderitaan korban dan menegaskan komitmen negara terhadap keadilan sosial.

**6 Pencabutan Kewarganegaraan Hambali:** Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, pemerintah Indonesia dapat mempertimbangkan untuk mencabut kewarganegaraan Hambali dan jika terbukti bahwa Hambali telah memperoleh kewarganegaraan Spanyol secara sah, maka pencabutan kewarganegaraan Indonesia dapat menjadi langkah yang tegas dan sah secara konstitusional, dan sesuai dengan prinsip keamanan nasional. Namun, langkah tersebut tetap memerlukan proses verifikasi lebih lanjut, terutama terkait dengan keaslian dokumen yang dimilikinya.



# ThinkTank.id

THINKERS FOR TOMORROW